

MEMASYARAKATKAN PERPOLISIAN MASYARAKAT

Hasnul Insani, M. Pd.¹

Abstrak:

Tingkat kejahatan yang semakin meningkat di lingkungan kita menuntut reformasi dalam kegiatan perpolisian Indonesia. Reformasi yang paling praktis dan efektif adalah pembaharuan kegiatan perpolisian yang secara konvensional menjadi kegiatan perpolisian yang lebih modern dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat secara efektif dan efisien, yang dikenal dengan Perpolisian Masyarakat atau Polmas.

Kata Kunci:

Kata kunci: Kekayaan Alam- Kejahatan- Lingkungan Hidup, Konservasi

A. Latar Belakang

“Waktu itu saya ditodong di bis, saat itu saya sudah teriak-teriak minta tolong. Tapi semua penumpang hanya menonton saja tidak ada yang mau membantul?”

Kalimat di atas muncul dari seorang warga Jakarta yang memberikan ilustrasi, betapa kejahatan begitu akrab di lingkungan kita dan polisi dianggap tidak bisa untuk selalu siap siaga melindungi masyarakat. Sebaliknya

malah masyarakat itu sendirilah diminta bahu mambahu menciptakan keamanan bagi diri mereka sendiri. Hasil studi organisasi kepolisian di negara-negara barat menyebutkan bahwa kegiatan perpolisian konvensional, meskipun diperlukan tidak cukup efektif memberantas kejahatan. Oleh karena itulah perlunya dibentuk kemitraan polisi dengan masyarakat untuk memberantas kejahatan, yang dikenal dengan kegiatan perpolisian masyarakat atau disingkat polmas.

¹ Penulis adalah Pengajar PTIK - Jakarta

Polmas adalah sebuah filosofi yang mendorong terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan polisi dalam memecahkan masalah dan tindakan-tindakan proaktif sebagai landasan terciptanya kemitraan-kemitraan. Polmas juga merupakan suatu upaya kolaborasi antara polisi dan masyarakat untuk mengidentifikasi persoalan kriminalitas dan gangguan keamanan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa polmas merupakan pencegahan kejahatan dengan melibatkan masyarakat sekitar yang berbeda dengan polisi tradisional yang tidak melibatkan masyarakat sekitarnya. Kalau dalam perpolisian konvensional, polisi memberantas kejahatan dengan patroli preventif, reaksi cepat peristiwa-peristiwa kejahatan, dan kegiatan investigasi kejahatan. Dengan kata lain polisi konvensional melakukan kegiatan pencegahan kejahatan dengan sistem militeristik. Tidak demikian dengan system polmas ini. Polmas melakukan pencegahan kejahatan dan pemberantasan kejahatan dengan melakukan pendekatan kepada seluruh elemen masyarakat

dengan merangkul masyarakat tersebut untuk bersama-sama mempunyai rasa tanggung jawab bersama untuk memberantas kejahatan di lingkungan sekitar.

Sering terjadinya kejahatan dalam masyarakat menyebabkan peran penegakkan hukum sangatlah dibutuhkan. Walau polisi selalu siap melindungi, namun banyak juga masyarakat yang mengharapkan polisi sebaiknya melindungi mereka menurut cara atau pendapat mereka sendiri, bukan menurut polisi. Contohnya, selama ini polisi melindungi masyarakat dengan selalu siap siaga di pos polisi saja, sementara masyarakat lebih membutuhkan polisi berada di tengah-tengah mereka. Polmas menciptakan masyarakat dapat bergabung dengan polisi setempat untuk memerangi kejahatan dalam lingkungan mereka secara aktif. Untuk lebih jelasnya, berikut ini beberapa keuntungan Polmas:

1. Menciptakan masyarakat yang aktif.
2. Anggota masyarakat secara sukarela memimpin dan mengarahkan Polmas.
3. Anggota masyarakat tidak menyerahkan dan menunggu polisi untuk mencegah dan memberantas kejahatan.

Polmas di sini dapat diartikan Polisi dan masyarakat bekerjasama untuk memberantas, menekan, mencegah kejahatan dan ketidaktertiban di masyarakat. Efektivitas fungsi polisi dan ketertiban masyarakat tidak dapat ditingkatkan menjadi lebih baik, kecuali jika masyarakat menyakini untuk melakukan lebih banyak lagi untuk diri mereka sendiri.

B. Unsur-unsur Polmas

Polmas membentuk praktik-praktik kepolisian yang fundamental dengan penekanan pada pencegahan kejahatan dan berakhir dengan solusi terhadap suatu masalah. Hal ini membutuhkan komitmen baru dari masyarakat dengan paradigma baru dari polisi. Pada kenyataannya dalam kegiatan polmas terdapat tiga komponen besar yang penting dan saling melengkapi, yakni:

1. Kemitraan masyarakat

Kemitraan masyarakat mengandung arti membawa kembali masyarakat ke dalam proses perpolisian. Semua elemen masyarakat mesti ditarik bersama yang selama ini belum pernah dilakukan agar secara efektif

menghadapi tingkat kejahatan yang tidak dapat diterima oleh semua lingkungan. Polmas dapat memperbesar usaha polisi untuk mengendalikan dan mencegah kejahatan. Masyarakat tidak lagi dilihat oleh polisi sebagai suatu kehadiran pasif atau hanya sebagai sumber informasi terbatas saja. Namun lebih dari itu sebagai mitra dalam melakukan usaha-usaha yang memberikan kontribusi pada ketertiban dan kesejahteraan lingkungan.

Praktik tersebut, seperti; membantu korban kecelakaan atau kejahatan, bekerjasama dengan warga dan pengusaha setempat untuk memperbaiki kondisi lingkungan, mengendalikan lalu lintas dan pejalan kaki dan sebagainya. Dengan demikian keprihatinan masyarakat mengenai kriminal dan ketidaktertiban harus menjadi target utama usaha polisi dan masyarakat untuk bekerja sama mengatasinya.

Dengan seringnya polisi turun ke jalan, berdiskusi dengan masyarakat dan melakukan pendekatan-pendekatan yang humanistik akan membantu masyarakat untuk percaya kepada polisi. Kepercayaan yang telah terbentuk memungkinkan polisi

mengakses informasi berharga dari masyarakat yang dapat memecahkan dan mencegah kejahatan.

Rasa saling percaya tidak dapat diciptakan dalam waktu singkat. Agar hal itu tercipta, harus ada usaha terus menerus dari kedua belah pihak. Namun demikian, kepercayaan harus lebih dahulu diajukan sebelum polisi mulai mempelajari kebutuhan masyarakat dalam upaya menciptakan hubungan yang erat dengan masyarakat. Hubungan kerjasama yang erat itulah yang akan memperkuat rasa saling percaya antara polisi dan masyarakat.

2. Pemecahan Masalah

Bila prioritas masalah telah diidentifikasi, pemecahan masalah akan membutuhkan informasi yang dapat dianalisis untuk menemukan siapa dan bagaimana korbannya? Kapan dan dimana tepatnya masalah tersebut terjadi? Dan kondisi lingkungan yang bagaimana yang dapat membuat kejahatan mudah terjadi? Jika suatu permasalahan telah diketahui pemecahan masalah akan membuat solusi yang dapat dikembangkan dan diimplementasikan secara bersama-sama oleh polisi dan anggota masyarakat. Mereka

akan bekerja sama untuk mendefinisikan kesuksesan dan mengukur keberhasilan usaha-usaha.

Jenis permasalahan dalam masyarakat sangat berbeda dan sering melibatkan permasalahan berulang-ulang terjadi atau beragam yang berkaitan dengan faktor-faktor geografis, waktu, korban, atau kelompok pelaku dan lingkungan setempat. Masalah-masalah tersebut dapat mempengaruhi suatu wilayah kecil dalam suatu masyarakat di seluruh lingkungan atau di beberapa lingkungan masyarakat. Permasalahan-permasalahan dalam masyarakat dapat mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Besarnya angka pencurian di suatu kompleks perumahan yang menimbulkan kekawatiran dan ketakutan besar di antara penghuninya.
2. Masalah pengemis yang menciptakan ketakutan atau kekawatiran di pusat pertokoan atau perkantoran.
3. Pelacuran yang terjadi di taman-taman atau di jalanan, kelompok pemuda yang sering mengganggu, yang berkumpul di area parkir supermarket atau mal.

4. Seseorang yang selalu mengganggu atau memprovokasi anggota masyarakat.

Oleh karena itu di dalam polmas, proses pemecahan masalah tergantung kepada input baik dari sisi polisi, maupun dari masyarakat. Pemecahan masalah dapat mencakup:

1. Menghilangkan masalah-masalah secara keseluruhan. Tipe solusi ini biasanya dibatasi pada masalah-masalah yang menyangkut ketertiban. Contohnya menghilangkan sama sekali kemacetan lalu lintas dengan cara memasang tanda-tanda lalu lintas, dan meruntuhkan atau memperbaiki gedung-gedung tua yang tidak dapat digunakan lagi yang kalau tidak segera ditangani dapat mendorong terjadinya kejahatan.
2. Mengurangi jumlah masalah. Perdagangan narkoba dengan masalah-masalah yang ditimbulkannya, seperti perampokan dan kekerasan gang akan dapat dikurangi kalau polisi dan masyarakat bekerja sama dengan mendirikan pusat konsultasi dan rehabilitasi narkoba. Solusi jangka menengahnya termasuk mengintensifkan penyuluhan

narkoba di sekolah, lembaga keagamaan lain dan rumah sakit.

3. Mengurangi tingkat kerugian atau tingkat kesakitan di setiap kejadian. Misalnya, polisi dapat mengajarkan para pekerja toko tindakan bagaimana yang sebaiknya dilakukan jika terjadi perampokan. Kepada masyarakat seperti menghindari terjadinya kecelakaan atau cedera, bahkan kematian dan juga memberikan nasihat kepada para wanita di suatu lingkungan masyarakat mengenai cara-cara meminimalkan kemungkinan terbunuh atau cedera ketika diserang.
4. Menangani faktor-faktor lingkungan untuk mengurangi niat para penjahat yang ingin melakukan tindakan kriminal. Hal ini meliputi usaha bersama untuk menambahkan penerangan, mencabut rumput yang sudah panjang atau menebang semak belukar, serta menutup bangunan atau gedung yang kosong.

3. Perubahan Manajemen

Perubahan manajemen ini mensyaratkan pengenalan antara

kemitraan polmas dan pengimplementasian kegiatan-kegiatan pemecahan masalah yang akan mengubah struktur organisasi polisi. Perubahan manajemen secara tepat melibatkan pengenalan kebutuhan untuk berubah, mengkomunikasikan pandangan yang jelas bahwa perubahan mungkin dilakukan, mengidentifikasi langkah-langkah nyata yang diperlukan bagi perubahan-perubahan positif yang akan terjadi, mengembangkan pemahaman tentang keuntungan-keuntungan perubahan, dan menciptakan suatu komitmen organisasi yang besar untuk berubah.

Salah satu contoh perubahan struktur polisi adalah petugas patroli. Biasanya petugas patroli sekarang menggunakan mobil, tetapi berubah kembali lagi ke zaman dulu, dimana polisi berpatroli dengan berjalan kaki. Hal ini dimaksudkan agar petugas patroli tersebut, bisa lebih mendekati diri kepada masyarakat untuk mengetahui permasalahan sebenarnya apa yang sedang terjadi di lingkungan.

Sparrow menyatakan bahwa untuk menciptakan kemitraan dengan masyarakat, polisi harus berusaha memberdayakan dua

kelompok: masyarakat dan petugas polisi lapangan yang melayani masyarakat secara lebih dekat dan teratur. Hanya bila masyarakat benar-benar mempunyai hak suara dalam menentukan prioritas pemolisian barulah kebutuhan-kebutuhannya benar-benar diperhatikan; hanya kalau petugas lapangan diberi kebebasan bergerak secara operasional untuk menangani masalah yang mereka hadapi dengan dukungan aktif dari instansinya barulah kebutuhan-kebutuhan tersebut diperhatikan.

C. Bagaimana Polmas Berhasil

1. Tujuan polmas

Jika polisi dan masyarakat telah menjadi partner dalam mengatasi masalah kerusakan dan memikirkan bagaimana cara menurunkan tingkat kejahatan yang meningkat, polmas akan menempatkan penekanan yang besar pada pencegahan kejahatan. Dengan adanya kekuatan partner ini, polmas dapat membasmi akar kejahatan. Esensi Polmas adalah berkurangnya tingkat kriminalitas seiring dengan meningkatnya kualitas hidup. Sedangkan manfaat yang tercipta dari metode ini adalah lenyapnya rasa cemas atau ketakutan, serta meningkatnya kualitas hidup

masyarakat. Di sisi lain, polisi pun menjadi efektif menjalankan tugasnya dan lebih akuntabel di mata masyarakat. Dengan kata lain, Polmas meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas polisi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan Polmas adalah:

1. Terwujudnya kerjasama antara polisi dan masyarakat lokal untuk menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban sosial dalam rangka menciptakan ketenteraman umum dalam kehidupan masyarakat setempat.
2. Menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban sosial yang mengandung makna bukan hanya mencegah timbulnya, tetapi juga mencari jalan keluar pemecahan masalah.
3. Menciptakan ketenteraman umum yang berarti dituju oleh polmas bukan hanya sekedar ketiadaan gangguan faktual terhadap keamanan dan ketertiban, tetapi juga perasaan takut warga dalam kehidupan bersama dalam komunitas.
4. Kerjasama polisi dan masyarakat mengandung makna, bukan sekedar bekerjasama

dalam operasional penanggulangan kejahatan dan ketidaktertiban social, tetapi juga meliputi; mekanisme kemitraan yang mencakup keseluruhan proses manajemen, mulai dari perencanaan sampai pengawasan, pengendalian dan analisis, evaluasi atau pelaksanaan. Karena itu, sebagai suatu tujuan, kerjasama tersebut merupakan proses yang terus menerus tanpa akhir.

2. Keterlibatan Masyarakat yang Aktif

Polmas memperkenalkan keterlibatan masyarakat yang memberikan dimensi baru terhadap kegiatan pencegahan dan kontrol kejahatan. Sementara polisi yang bertanggung jawab sebagai penegak hukum akan berusaha terus mengatasi dan melawan kejahatan. Polisi dan masyarakat bekerjasama mengubah kondisi yang bisa menimbulkan tindakan kriminal.

Bagaimanapun juga harus kita sadari, bahwa kriminalitas merupakan problematika sosial yang sangat kompleks dan tak mungkin dapat ditangani hanya oleh satu institusi saja. Dengan demikian beban dan

tanggung jawab tersebut tidak selayaknya hanya dipikul oleh kepolisian sendiri. Oleh sebab itu, dalam polmas persoalan kriminalitas didekonstruksi menjadi bagian-bagian kecil yang dapat ditangani. Setiap petugas kepolisian bertanggung jawab terhadap suatu wilayah dengan persoalan yang terbatas saja, sehingga dapat ditangani dengan baik dan maksimal.

3. Kepercayaan

Dalam membina hubungan dengan masyarakat yang saling membangun dan menjaga kepercayaan adalah merupakan tujuan utama dalam kemitraan masyarakat. Kepercayaan dapat memberikan polisi suatu akses yang lebih besar untuk dapat menilai informasi yang mengarah kepada pemecahan dan pencegahan kriminal. Membangun kepercayaan membutuhkan usaha yang terus menerus, tetapi juga merupakan hal yang sangat penting bagi polmas agar lebih efektif.

Ketika masyarakat sudah menyadari pentingnya keberadaan polisi yang terus menerus ada di tengah mereka, berbagai upaya harus dilakukan untuk mendorong

warga agar mereka mau memberikan informasi yang relevan. Berikut ini adalah beberapa hal penting yang dapat dilakukan polisi untuk membangun dan menciptakan kemitraan dengan masyarakat guna membangun kepercayaan masyarakat:

1. Polisi dapat berbicara dengan kelompok-kelompok di lingkungan tersebut.
2. Berpartisipasi dalam kegiatan warga, seperti perayaan hari proklamasi kemerdekaan RI.
3. Bekerja dengan badan-badan sosial lain, seperti panti asuhan, panti jompo dan lain sebagainya.
4. Turut ambil bagian dalam program yang bersifat edukatif dan rekreatif bagi anak-anak, remaja, pemuda dan perempuan. Seperti acara Hari Anak Jakarta Membaca, Penyuluhan Narkoba, Stop Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan lain sebagainya.

Kemitraan dengan masyarakat berarti memiliki perspektif yang tidak hanya ditekankan pada penegakkan hukum secara konvensional saja. Pandangan yang lebih luas ini diakui memberikan nilai terhadap kegiatan-kegiatan

yang membantu terciptanya ketertiban dan kesejahteraan sebuah lingkungan. Selain kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan di atas, polisi juga dapat:

- o Menolong korban kecelakaan atau kejahatan.
- o Memberikan pertolongan darurat (PPPK).
- o Membantu menyelesaikan konflik-konflik dalam rumah tangga, dan di lingkungan masyarakat (kekerasan rumah tangga, perselisihan penyewa dan pemilik rumah, atau pelecehan ras).
- o Bekerja dengan penduduk dan pengusaha setempat untuk meningkatkan kondisi lingkungan.
- o Membantu pengaturan lalu lintas kendaraan bermotor, pejalan kaki, dan permasalahan parkir.
- o Memberikan pelayanan sosial bagi orang yang rentan terhadap kejahatan.
- o Melindungi hak asasi manusia setiap anggota masyarakat.
- o Memberikan contoh sebagai warga negara yang baik (suka menolong, hormat pada orang lain, jujur, anti suap dan korupsi serta adil).

Jika kepercayaan ini sudah terbangun tentu akan memudahkan polisi untuk mendapatkan akses informasi yang lebih besar dan berharga dari masyarakat yang dapat mengarah pada pemecahan masalah dan pencegahan kejahatan.

Institusi kepolisian secara keseluruhan harus dilibatkan dalam memobilisasi atau menggerakkan masyarakat dan mendapatkan kepercayaan dari mereka.

Upaya membangun kepercayaan tentu saja memerlukan waktu dan usaha yang tidak putus-putus. Tetapi kepercayaan ini juga harus dibangun sebelum polisi dapat mempelajari kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan memiliki ikatan tertentu dengan masyarakat yang pada akhirnya akan mendukung polisi.

D. Polmas dan Penegakkan Hukum

1. Komitmen yang kuat

Polmas tidak menawarkan suatu keserasian (antara polisi dan masyarakat) yang cepat. Polmas membutuhkan komitmen yang lama dan kuat oleh polisi untuk bekerja dengan anggota masyarakat agar saling memperoleh tujuan yang ingin dicapai.

2. Keuntungan yang Besar

Polisi akan menemukan keuntungan yang sangat besar, di samping dapat membawa mereka lebih dekat kepada masyarakat. Polmas dapat memberikan lebih banyak lagi keuntungan yang lainnya, seperti; membuat lebih efektif lagi talenta-talenta atau sumber-sumber yang tersedia di dalam masyarakat untuk membantu memperluas sumber daya polisi yang selama ini dirasa terlalu tegang dan buruk dengan masyarakat.

Jika interaksi polisi dengan masyarakat telah menjadi lebih positif, kemitraan yang produktif akan terbentuk. Hal ini dapat mengarah kepada kepuasan yang lebih besar terhadap pelayanan polisi dan meningkatkan kepuasan kerja di antara polisi. Dengan berkurangnya tingkat kejahatan dapat membuat sumber daya polisi dialihkan kepada pelayanan-pelayanan yang lebih mempunyai pengaruh besar bagi kualitas kehidupan masyarakat.

3. Bagaimana Memulainya

Komunikasi merupakan suatu landasan yang paling penting untuk bekerja sama, berkoordinasi, berkolaborasi, dan melakukan

berubah. Oleh karena itu, kita dapat memulainya dengan saling berkomunikasi secepatnya, sebagai proses perwujudan Polmas. Jika kebetulan di antara kita ada seorang perwakilan penegak hukum yang mempunyai keinginan untuk mewujudkan Polmas, mereka bisa bergabung dengan sesama koleganya untuk membahas, menilai atau mengontrol masalah-masalah kejahatan yang terjadi dalam masyarakat dan berdiskusi bagaimana sebaiknya pendekatan yang dilakukan. Polmas dapat meningkatkan usaha-usaha penegakkan hukum mereka ke depan.

Seperti; berdiskusi dengan anggota masyarakat dan perwakilan kelompok-kelompok masyarakat mengenai apa yang mereka ketahui tentang Polmas? Mereka dapat memulai dengan membicarakan bagaimana pendapat-pendapat anggota dan kelompok masyarakat mengenai kriminalitas dan ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di lingkungan. Jika di antara kita ada seorang anggota organisasi masyarakat, dia dapat menghubungi agen penegak hukum di daerahnya untuk mendiskusikan usaha-usaha perwujudan Polmas. Misalnya dengan menanyakan kepada pihak penegak

hukum, bagaimana organisasi masyarakat dapat membantu polisi dalam mengatasi masalah kriminalitas di lingkungan.

4. Kapan Polmas Dikatakan Sudah Efektif

Polmas dapat dikatakan sudah efektif, jika telah memenuhi indikator sebagai berikut:

1. Berkurangnya tingkat kejahatan secara menyeluruh.
2. Meningkatnya laporan terhadap kejahatan yang selama ini jarang dilaporkan, seperti pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan pelecehan terhadap anak-anak. Apabila laporan seperti kejahatan ini meningkat dalam daftar polisi yang merupakan salah satu indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap polisi.
3. Masyarakat memiliki persepsi yang lebih baik tentang polisi.
4. Berkurangnya rasa takut terhadap aksi kejahatan.
5. Adanya pelayanan polisi yang lebih baik dan profesional kepada masyarakat.
6. Berkurangnya keadaan yang memicu terjadinya kejahatan
7. Adanya komunikasi yang lebih baik antara polisi dan masyarakat.

8. Masyarakat turut bertanggung jawab terhadap terjadinya kejahatan.

E. Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM)

Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) bertujuan untuk menjembatani komunikasi antara polisi dan masyarakat secara harmonis dan juga menjembatani masyarakat yang mempunyai masalah. FKPM ini beranggotakan polisi, masyarakat, para tokoh masyarakat, alim ulama dan pemuda. Organisasi ini bisa bertempat di kecamatan atau kelurahan yang bisa membangun gedungnya sendiri, balai desa, atau bahkan rumah petugas polisi itu sendiri. Masa bakti anggota FKPM bisa tiga tahun atau lima tahun sekali, dan seterusnya yang ditentukan dalam rapat anggota.

Tugas dan fungsi FKPM adalah:

1. Meningkatkan hubungan polisi dan masyarakat.
2. Mengawasi kinerja polisi sebagai pengayom masyarakat.
3. Menyampaikan informasi dan situasi desanya masing-masing mengenai stabilitas keamanan kepada polisi.

4. Sosialisasi FKPM kepada masyarakat melalui kelurahan atau kecamatan.
6. Semakin meningkatnya pelayanan polisi terhadap masyarakat dan komitmen terhadap penerapan prinsip HAM dalam setiap tindakan dan perilaku polisi.

Sedangkan indikator keberhasilan FKPM dapat dirinci sebagai berikut:

1. Ada rapat dan pertemuan konsultasi resmi yang dihadiri oleh seluruh anggota FKPM (polisi dan Masyarakat) untuk membahas persoalan-persoalan Kamtibmas-Ketertiban masyarakat dan ketertiban masyarakat.
2. Ada persoalan kamtibmas yang dibahas dalam rapat untuk diidentifikasi, dianalisa, dan dipecahkan secara bersama-sama.
3. Adanya komunikasi dan koordinasi antara polisi dan masyarakat dalam membahas persoalan-persoalan kamtibmas.
4. Adanya laporan dari pihak kepolisian kepada masyarakat (melalui FKPM) dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai penegak hukum, penjaga Kamtibmas, pelayan dan pelindung masyarakat, secara transparan dan akuntabel.
5. Adanya peliputan media secara objektif tentang kinerja baik kepolisian dalam menjalankan tiga fungsinya.
7. Meningkatnya laporan masyarakat kepada polisi, terkait dengan kasus-kasus yang selama ini jarang terungkap dan dilaporkan.
8. Adanya kerjasama dengan lembaga lain, kelompok bisnis, dan lain-lainnya guna meningkatkan kepedulian dan komitmen untuk mewujudkan kamtibmas demi kepentingan bersama.
9. Adanya usulan, pandangan, monitoring, dan evaluasi yang diberikan kepada polisi terkait dengan hal-hal berikut:
 - o Pembangunan pos polisi dan penempatan personilnya.
 - o Respon dan tindak lanjut pengaduan yang disampaikan masyarakat kepada polisi.
 - o Pelayanan izin dan perlindungan serta pengamanan kegiatan keramaian yang diajukan masyarakat.
 - o Patroli ke kawasan pemukiman dan niaga.
 - o Perlakuan dan keterbukaan dalam pemrosesan secara hukum terhadap pelaku kejahatan.

F. Penutup

Demikian catatan singkat ini juga merupakan masukan terhadap perpolisian Indonesia, semoga

dengan adanya keterlibatan masyarakat yang aktif dan efektif ini perpolisian kita akan lebih baik di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka:

- Community Policing Consortium, *Understanding Community Policing, A framework for action*, terj. Ronny Lihawa (Jakarta: YPKIK, 2005).
- Friedman, Robert R, *Community Policing, Comparative, Perspective and Prospects*, terj. Kunarto dan Ardian syamsuddin (Jakarta: Cipta Manunggal, 1998).
- National Crime Prevention Institute, *Understanding Crime Prevention* (Butterworth Publisher, USA, 1986)
- Polri, *Perpolisian Masyarakat* (Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2006).
- Republik Indonesia. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Sparrow, Malcolm K, and Favid M Kennedy. *Beyond 911: A new era for polising* (New york: Basic Books. 1990).
- Sutanto, *Polmas Paradigma Baru Polri* (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2006).
- Surat Keputusan Kapolri Jakarta Pusat Nopol: SKEP/737/X/2005. JKPST, tgl 13 Oktober 2005.
- Hasil wawancara dengan seorang warga Jakarta di Blok M, Agustus 2006.
